

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. 1984. *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Jasa Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana: Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta.
- Hans Kelsen. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Terjemahan Nurulita Yusron. Nusa Media: Bandung.
- J.E. Sahetapy. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. P.T. Almuni: Bandung.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama: Bandung.

Mompang L. Pangabea. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. UKI Press: Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1884. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Riduan Syahrani. 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Salim Hs. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press: Jakarta.

_____, 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta.

Shinta Agustina. 2014. *Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Themis Books: Depok.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.

_____, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta.

Wiryo Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Erwaco: Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

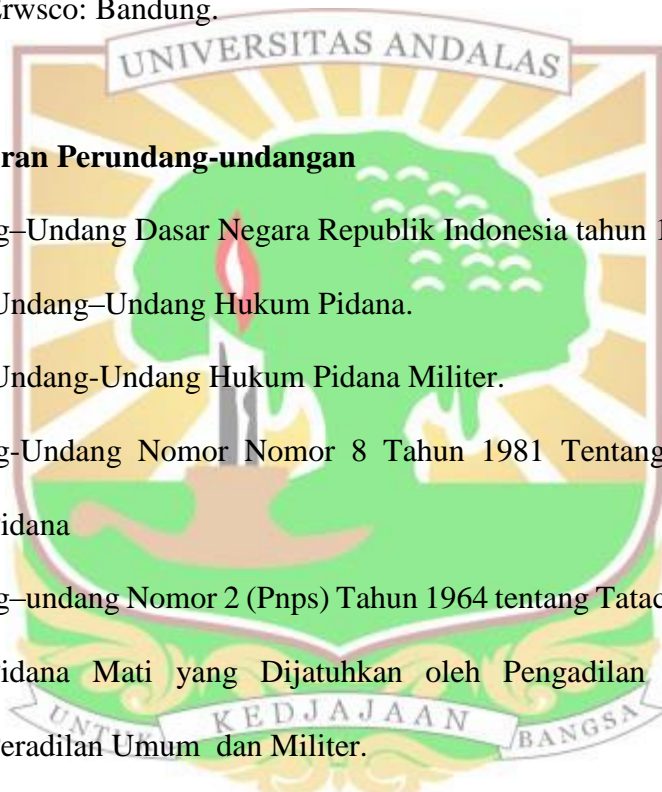
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964 tentang Tatacara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Undang-undang Nomor 21 Prp Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 5 Pnps Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Grasi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara tindak Pidana Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-235/E/3/1994 perihal Eksekusi Putusan Pengadilan.

Instruksi Jaksa Agung INS-006/J.A/4/1995 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum.

C. Website

[https://hukumonline.com/klinik//detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-](https://hukumonline.com/klinik//detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-administratif))
(pidana,-perdata,-administratif)

